

KEPATUHAN TERHADAP CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA DALAM KONSERVASI CURIK BALI DI UNIT SUAKA SATWA CURIK BALI

Ziyad Al Insan¹, Abid Rohman²

Email: ziyadinsan19@gmail.com , abid.rohman@uinsby.ac.id

Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri
Sunan Ampel Surabaya

Abstract

*This study analyzes the implementation of CITES standards in the conservation of the Bali Myna (*Leucopsar rothschildi*) at the Bali Myna Sanctuary Unit (USSCB), West Bali National Park (TNBB). Using a qualitative single-case study approach and Mitchell's Compliance Theory, this research examines how international norms translate into operational practices. The results indicate a significant ecological success, with the monitored population increasing from 14 individuals in 2011 to 692 in 2024, alongside 747 released birds. However, an institutional compliance gap exists. CITES principles mostly influence local conservation through national regulations rather than direct field protocols. Key operational shortcomings include the absence of an official carrying capacity assessment for Non-Detriment Findings (NDF), unintegrated individual marking systems, and unformalized Standard Operating Procedures (SOPs). While substantive compliance with conservation goals is strong, administrative-institutional compliance remains unconsolidated. Strengthening scientific baselines and data integration is essential to ensure long-term sustainability.*

Keywords: *CITES, Compliance Theory, Bali Myna, Conservation, West Bali National Park.*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis penerapan standar CITES dalam konservasi Curik Bali (*Leucopsar rothschildi*) di Unit Suaka Satwa Curik Bali (USSCB), Taman Nasional Bali Barat (TNBB). Menggunakan pendekatan studi kasus tunggal kualitatif dan *Compliance Theory* dari Mitchell, penelitian ini menguji bagaimana norma internasional diterjemahkan

Article History

Received: Oktober 2026

Reviewed: Oktober 2026

Published: Oktober 2026

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

¹ Catatan kaki Biodata Selain Instansi terkini

² Catatan kaki Biodata Selain Instansi terkini

ke dalam praktik operasional. Hasil penelitian menunjukkan keberhasilan ekologis yang signifikan, di mana populasi terpantau meningkat dari 14 ekor pada tahun 2011 menjadi 692 ekor pada tahun 2024, serta total 747 ekor telah dilepasliarkan. Namun, terdapat kesenjangan kepatuhan kelembagaan. Prinsip CITES lebih banyak memengaruhi konservasi lokal melalui regulasi nasional dibanding protokol operasional langsung. Kesenjangan utama meliputi ketiadaan kajian *carrying capacity* resmi untuk *Non-Detriment Finding* (NDF), sistem penandaan individu yang belum terintegrasi secara nasional, serta Standar Operasional Prosedur (SOP) yang belum sepenuhnya diformalkan. Meskipun kepatuhan substantif terhadap tujuan konservasi tergolong kuat, kepatuhan administratif-institusional belum terkonsolidasi. Penguatan basis ilmiah dan integrasi data sangat diperlukan untuk menjamin keberlanjutan konservasi.

Kata kunci: CITES, Teori Kepatuhan, Curik Bali, Konservasi, Taman Nasional Bali Barat

PENDAHULUAN

Seekor burung cantik dan menawan ternyata menyimpan duka dan kompleksitas dibalik sayap putih dan cuitannya. Curik Bali (*Leucopsar rothschildi*) merupakan burung endemik Indonesia yang menjadi salah satu spesies prioritas konservasi di Taman Nasional Bali Barat (TNBB). Spesies ini menghadapi ancaman serius akibat kehilangan habitat, perburuan, dan perdagangan ilegal sehingga berada dalam kategori *Critically Endangered*. Berbagai upaya konservasi telah dilakukan melalui penangkaran, pelepasliaran, dan pemantauan populasi. Squires et al. (2024) menunjukkan bahwa program konservasi di TNBB telah berkontribusi terhadap peningkatan populasi dan perluasan distribusi Curik Bali. Temuan tersebut menunjukkan perkembangan positif, akan tetapi keberhasilan konservasi tetap bergantung pada konsistensi pengelolaan dan kapasitas kelembagaan di tingkat lapangan.

Dalam rezim lingkungan internasional, Curik Bali termasuk dalam Appendix I *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES). Status tersebut memberikan perlindungan ketat terhadap perdagangan internasional spesies ini. Namun, keberadaan aturan internasional tidak serta-merta menjamin pelaksanaannya di tingkat nasional maupun lokal. Kajian mengenai CITES menunjukkan bahwa efektivitas rezim tersebut dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, ketersediaan sumber daya, koordinasi antaraktor, serta kemampuan menerjemahkan norma internasional ke dalam praktik domestik (Wyatt, 2021; Escobar-Pemberthy & Ivanova, 2020; Challender et al., 2025). Oleh karena itu, kepatuhan terhadap rezim lingkungan internasional perlu dilihat tidak hanya dari keberadaan regulasi, tetapi juga dari bagaimana standar tersebut diterapkan dalam praktik.

Penelitian mengenai Curik Bali selama ini lebih banyak berfokus pada aspek ekologi dan populasi. Hernowo (2017) membahas perkembangan populasi setelah pelepasliaran, Sutomo (2021) mengkaji karakteristik habitat, sedangkan Danby et al. (2022) membahas aspek perilaku

yang berkaitan dengan keberhasilan konservasi. Squires et al. (2024) kemudian menunjukkan bahwa peningkatan populasi Curik Bali berkaitan dengan kombinasi penangkaran, pelepasliaran, dan pengelolaan populasi. Penelitian tersebut memberikan pemahaman penting mengenai aspek ekologis konservasi, tetapi belum secara khusus membahas bagaimana standar CITES diterapkan dalam praktik kelembagaan konservasi Curik Bali.

Di sisi lain, penelitian mengenai CITES semakin banyak membahas persoalan implementasi dan kepatuhan. Wyatt (2021) menunjukkan bahwa implementasi CITES menghadapi persoalan koordinasi dan kapasitas kelembagaan. Escobar-Pemberthy dan Ivanova (2020) menekankan pentingnya kapasitas manajemen, informasi, dan regulasi dalam implementasi perjanjian lingkungan internasional. Challender et al. (2025) juga menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia, finansial, dan teknis dapat memengaruhi kemampuan negara dalam memenuhi tujuan CITES. Sementara itu, Morton, Nijman, dan Edwards (2024) menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap instrumen CITES perlu dilihat bersama dengan kemampuan pengelolaan dan penyesuaian kebijakan terhadap perubahan kondisi konservasi.

Meskipun kajian mengenai CITES dan konservasi Curik Bali telah berkembang, masih terdapat kesenjangan antara penelitian mengenai kepatuhan CITES pada tingkat negara dan penelitian mengenai konservasi Curik Bali pada Tingkat lokal. Kajian yang secara khusus menghubungkan standar CITES dengan praktik konservasi pada tingkat unit operasional masih terbatas. Padahal, keberhasilan suatu rezim lingkungan internasional tidak hanya ditentukan oleh pembentukan norma dan regulasi, tetapi juga oleh kemampuan institusi pelaksana dalam menerjemahkan norma tersebut menjadi prosedur dan tindakan di lapangan.

Penelitian ini menggunakan perspektif *compliance* dalam rezim lingkungan internasional untuk menganalisis hubungan antara norma internasional dan praktik kelembagaan. *Compliance* dipahami sebagai kesesuaian perilaku aktor dengan kewajiban atau standar yang ditetapkan dalam suatu rezim internasional. Perspektif ini memungkinkan penelitian untuk melihat sejauh mana standar CITES diterapkan dalam praktik konservasi, bukan hanya melihat keberadaan regulasi pada tingkat nasional. Dengan demikian, analisis diarahkan pada kesesuaian prosedur dan praktik konservasi dengan prinsip dan standar yang relevan dalam CITES.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : **bagaimana standar CITES diterapkan dalam praktik konservasi Curik Bali pada tingkat unit operasional, dan faktor apa yang memengaruhi kesesuaian atau kesenjangan antara standar CITES dan praktik tersebut?** . Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan CITES dalam konservasi Curik Bali di TNBB, mengidentifikasi bentuk kesesuaian dan kesenjangan dalam praktik kelembagaan, serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan standar tersebut. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memastikan bahwa komitmen konservasi dalam rezim internasional tidak berhenti pada tingkat regulasi, tetapi juga diterapkan secara efektif dalam praktik kelembagaan untuk mendukung perlindungan Curik Bali sebagai spesies yang terancam punah. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap kepatuhan (*compliance*) CITES pada tingkat unit konservasi, bukan hanya pada tingkat negara maupun hasil ekologis program konservasi. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mempertemukan kajian rezim lingkungan internasional dengan praktik konservasi di tingkat lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif karena bertujuan memahami secara mendalam pelaksanaan konservasi Curik Bali (*Leucopsar rothschildi*), termasuk proses, praktik, dan koordinasi kelembagaan yang berlangsung di Unit Suaka Satwa Curik Bali (USSCB), Taman Nasional Bali Barat (TNBB). Menurut Creswell dan Poth (2018), pendekatan kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna suatu permasalahan sosial berdasarkan pengalaman partisipan dan konteks alamiahnya. Penelitian ini menggunakan desain studi kasus tunggal (*single case study*) karena berfokus pada satu kasus spesifik, yaitu pelaksanaan konservasi Curik Bali di USSCB (Yin, 2018). Mengacu pada Mochtar Mas'ood (1990), unit analisis penelitian adalah konservasi Curik Bali di Unit Suaka Satwa Curik Bali, dengan level analisisnya kelompok, yaitu USSCB sebagai unit kelembagaan pelaksana konservasi.

Penentuan situasi sosial mengacu pada Sugiyono (2022), yang mencakup tempat (*place*), aktivitas (*activity*), dan aktor (*actors*). Tempat penelitian adalah USSCB, aktivitas yang dikaji meliputi pelaksanaan konservasi, pemantauan, pencatatan, pelaporan, dan koordinasi kelembagaan, sedangkan aktor penelitian adalah pihak yang terlibat dalam pengelolaan konservasi. Informan ditentukan secara *purposive* berdasarkan relevansi posisi dan pengetahuannya, yaitu drh. Hana Retno Erdianti selaku Kepala Unit USSCB sekaligus dokter hewan TNBB. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur dan studi dokumentasi, meliputi Laporan Monitoring Curik Bali Tahun 2025 (Balai TNBB, 2025), dokumen CITES, peraturan perundang-undangan nasional, dan literatur akademik yang relevan.

Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Data dikelompokkan berdasarkan tema pelaksanaan konservasi, pemantauan, pelaporan, koordinasi kelembagaan, dan penerapan ketentuan terkait CITES. Selanjutnya, *compliance gap analysis* digunakan untuk membandingkan ketentuan normatif CITES dan regulasi nasional dengan praktik konservasi di USSCB guna mengidentifikasi kesesuaian dan kesenjangan pelaksanaan. Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber dan teknik dengan membandingkan hasil wawancara, dokumen resmi, dan literatur akademik untuk memperkuat kredibilitas temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Posisi CITES dalam Tata Kelola Konservasi Curik Bali

Hasil penelitian menunjukkan bahwa CITES memiliki posisi penting dalam tata kelola konservasi Curik Bali (*Leucopsar rothschildi*) di Taman Nasional Bali Barat (TNBB), tetapi pengaruhnya lebih banyak hadir melalui proses domestikasi norma internasional ke dalam kebijakan nasional daripada melalui penerapan CITES secara langsung pada tingkat operasional. Curik Bali tercantum dalam Appendix I CITES, sementara Indonesia telah menerjemahkan komitmen konservasi dan pengendalian perdagangan spesies tersebut ke dalam berbagai instrumen nasional, termasuk Permen LHK No. P.106/2018, SK Dirjen KSDAE No. 314/2018, dan Kepmenhut No. 447/Kpts-II/2003. Dengan demikian, CITES berfungsi sebagai salah satu kerangka normatif yang membentuk arah kebijakan konservasi, sedangkan pelaksanaan teknis di TNBB terutama dilakukan melalui perangkat hukum nasional dan mekanisme kelembagaan konservasi.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian mengenai implementasi CITES di negara berkembang yang menunjukkan bahwa keberadaan aturan internasional tidak selalu diikuti oleh keseragaman kapasitas kelembagaan pada tingkat pelaksana. Temuan mengenai pentingnya kapasitas tersebut juga tercermin dalam kebijakan CITES yang semakin menekankan *capacity-building* sebagai bagian dari peningkatan implementasi dan kepatuhan, terutama bagi negara yang menghadapi keterbatasan sumber daya kelembagaan (CITES, 2023).

Dalam konteks penelitian ini, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada tidak adanya norma konservasi, melainkan pada jarak antara norma, instrumen

nasional, dan kapasitas operasional. Dengan demikian, konsep *compliance through capacity* Chayes dan Handler Chayes (1995) tetap relevan sebagai landasan analitis, tetapi temuan penelitian memperluasnya: kepatuhan terhadap CITES tidak cukup dilihat dari keberadaan regulasi, melainkan dari kemampuan lembaga menerjemahkan norma tersebut menjadi data, prosedur, sistem dokumentasi, serta mekanisme pengawasan yang dapat diverifikasi. Perspektif ini diperkuat oleh penelitian kontemporer yang menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan formal terhadap mekanisme CITES dapat relatif tinggi, tetapi efektivitasnya tetap bergantung pada kualitas informasi dan kemampuan pengelolaan yang adaptif (Morton, Nijman, & Edwards 2024).

Dinamika Populasi Curik Bali dan Efektivitas Tata Kelola Konservasi

Data *time series* dalam Laporan Monitoring TNBB 2025 menunjukkan peningkatan populasi Curik Bali dari 14 ekor pada 2011 menjadi 692 ekor pada 2024. Selain itu, sebanyak 747 ekor telah dilepasliarkan melalui program reintroduksi sejak 2013 sampai 2025. Data tersebut menunjukkan bahwa tata kelola konservasi di TNBB telah menghasilkan dampak ekologis yang positif.

Tabel 1. Perkembangan Populasi Curik Bali di TNBB

No	Tahun	Populasi terpantau	Keterangan
1	2011	14 ekor	Populasi awal monitoring
2	2021	420 ekor	Hasil monitoring tahunan TNBB
3	2024	692 ekor	Populasi tertinggi yang tercatat
4	2025	515 ekor	Penurunan angka terpantau
5	2013-2025	747 ekor	Total individu yang telah dilepasliarkan

Sumber: Laporan Monitoring TNBB (2025)

Peningkatan tersebut konsisten dengan penelitian Squires et al. (2023) yang menunjukkan bahwa populasi Curik Bali meningkat dari 15 ekor pada 2012 menjadi 420 ekor pada Oktober 2021. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa keberhasilan konservasi tidak hanya dipengaruhi oleh pelepasliaran, tetapi oleh perubahan strategi pengelolaan habitat, penyediaan kotak sarang, perluasan ruang jelajah, dan keterlibatan masyarakat di lanskap sekitar kawasan taman nasional. Temuan tersebut memperkuat hasil penelitian ini bahwa keberhasilan konservasi Curik Bali merupakan hasil interaksi antara pelepasliaran, pengelolaan habitat, monitoring, dan keterlibatan aktor di luar institusi taman nasional, bukan semata-mata konsekuensi dari keberadaan aturan CITES.

Penurunan populasi terpantau dari 692 ekor pada 2024 menjadi 515 ekor pada November 2025 juga perlu dibaca sebagai perubahan hasil monitoring, bukan otomatis sebagai penurunan populasi aktual. Berdasarkan wawancara dengan Drh. Hana Retno Erdianti, sebagian Curik Bali telah memperluas penyebarannya ke kebun dan lahan masyarakat sehingga berada di luar jangkauan monitoring MONCULI. Temuan ini justru memiliki kesesuaian dengan Squires et al. (2023), yang menemukan adanya perluasan sebaran Curik Bali ke kawasan di luar lokasi pelepasliaran utama. Artinya, meningkatnya kemampuan spesies memanfaatkan lanskap yang lebih luas menjadi indikator keberhasilan ekologis, tetapi sekaligus menciptakan tantangan baru bagi sistem monitoring konservasi.

Dalam perspektif CITES, kondisi tersebut penting karena kualitas data populasi menjadi fondasi bagi pengambilan keputusan ilmiah terkait spesies yang diperdagangkan dan pengelolaan populasi. Oleh sebab itu, persoalan utama di TNBB bukan semata jumlah Curik Bali yang berhasil

dipertahankan, tetapi sejauh mana data populasi mampu merepresentasikan kondisi aktual di lapangan. Penelitian terbaru mengenai tata kelola CITES juga menegaskan bahwa kepatuhan tidak cukup diukur dari terpenuhinya prosedur administratif, tetapi harus didukung informasi ilmiah yang akurat, transparan, dan mampu diperbarui sesuai perubahan kondisi populasi (Morton, Nijman, & Edwards 2024).

Kesenjangan Implementasi CITES pada USSCB

Berdasarkan triangulasi wawancara dan dokumen, terdapat tiga kesenjangan utama dalam penerjemahan prinsip CITES ke dalam tata kelola USSCB, yaitu ketersediaan basis ilmiah, integrasi data individu, dan formalisasi prosedur operasional.

Tabel 2. Kesenjangan Implementasi Prinsip CITES dalam Tata Kelola USSCB

No	Aspek	Kondisi di USSCB	Kesenjangan
1	Basis ilmiah populasi	Belum tersedia kajian <i>carrying capacity</i> resmi TNBB	Belum ada estimasi daya dukung yang terdokumentasi
2	Identifikasi individu	Menggunakan ring dan <i>stud book</i>	Belum terintegrasi dengan sistem data yang lebih luas
3	SOP konservasi	Terdapat SOP operasional, tetapi belum seluruhnya diformalkan	Nomor, tanggal pengesahan, autentikasi, dan konsistensi isi belum memadai
4	Monitoring populasi	MONCULI dilakukan secara berkala	Cakupan terbatas terhadap individu di luar kawasan monitoring

Sumber: Wawancara Drh. Hana Retno Erdianti dan Laporan Monitoring TNBB (2025), diolah Kembali

Khusus mengenai Non-Detriment Finding (NDF), penelitian ini menemukan bahwa belum tersedianya kajian *carrying capacity* TNBB menjadi kelemahan dalam penguatan basis ilmiah konservasi. Namun, perlu ditegaskan bahwa NDF merupakan instrumen CITES yang berkaitan terutama dengan keputusan perdagangan internasional, khususnya penilaian apakah suatu ekspor akan merugikan kelangsungan hidup spesies. Karena itu, ketiadaan kajian *carrying capacity* di TNBB tidak dapat secara langsung disebut sebagai pelanggaran kewajiban CITES. Posisi yang lebih tepat adalah bahwa keterbatasan tersebut melemahkan basis ilmiah yang diperlukan apabila data populasi TNBB digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan atau penilaian yang berkaitan dengan CITES. Prinsip ini sejalan dengan Resolusi Conf. 16.7 tentang NDF yang menekankan pentingnya informasi mengenai status populasi, distribusi, tren populasi, habitat, ancaman, dan kualitas informasi dalam penilaian ilmiah. Perkembangan kebijakan CITES hingga CoP20 juga menunjukkan bahwa penguatan metodologi dan pembaruan panduan NDF masih menjadi agenda penting komunitas CITES (CITES, 2025).

Temuan mengenai sistem penandaan individu menunjukkan kondisi yang relatif lebih maju karena USSCB telah menggunakan ring dan *stud book*. CITES sendiri mengakui pentingnya sistem identifikasi dan pencatatan dalam pengelolaan spesimen hasil penangkaran, khususnya pada spesies Appendix I. Data CITES juga membedakan berbagai sumber spesimen, termasuk hewan hasil penangkaran dan hewan Appendix I yang dibesarkan dalam fasilitas tertentu, sehingga keterlacakan asal individu menjadi bagian penting dari tata kelola perdagangan spesies terdaftar (CITES, 2022). Di Indonesia, CITES bahkan mencatat adanya fasilitas penangkaran Curik Bali yang menggunakan *closed ring* dan sistem identifikasi individu. Dengan demikian,

masalah USSCB bukan ketiadaan praktik penandaan, tetapi belum optimalnya integrasi dan standardisasi data antaraktor konservasi.

Sementara itu, kelemahan SOP menunjukkan bahwa proses konservasi masih cukup bergantung pada pengetahuan dan pengalaman personel. Perbedaan takaran pakan yang ditemukan dalam dokumen SOP menunjukkan belum kuatnya mekanisme *document control* dan standardisasi internal. Dalam perspektif kepatuhan, kondisi tersebut penting karena keberhasilan program yang sangat bergantung pada individu akan lebih rentan ketika terjadi pergantian personel. Hal ini mendukung temuan penelitian tentang implementasi CITES di berbagai negara bahwa kapasitas kelembagaan, koordinasi, dan konsistensi prosedur merupakan faktor penting dalam mengubah norma internasional menjadi praktik yang efektif (2024).

Keberhasilan Konservasi dan Batas Kepatuhan Formal

Menariknya, terdapat kesenjangan antara keberhasilan ekologis dan kelembagaan. Di satu sisi, populasi Curik Bali menunjukkan peningkatan yang signifikan dan distribusi yang semakin luas; di sisi lain, penelitian menemukan bahwa sejumlah instrumen pendukung tata kelola belum terdokumentasi dan terintegrasi secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan konservasi tidak selalu identik dengan tingginya tingkat formalisasi kepatuhan. Temuan tersebut memiliki kesesuaian dengan penelitian Squires et al. (2023) yang menunjukkan bahwa peningkatan populasi Curik Bali sangat dipengaruhi oleh fleksibilitas strategi pengelolaan, terutama kemampuan TNBB beradaptasi terhadap penggunaan habitat oleh Curik Bali di lanskap yang didominasi manusia. Penelitian mengenai *carrying capacity* Curik Bali di Nusa Penida juga memperlihatkan bahwa pertumbuhan populasi perlu diikuti dengan analisis daya dukung habitat agar peningkatan jumlah individu tetap berada dalam kondisi ekologis yang sesuai (Hardini et al. 2023). Dengan demikian, keberhasilan populasi di TNBB seharusnya diikuti dengan penguatan sistem pengukuran daya dukung, distribusi, dan kualitas habitat.

Temuan penelitian dianalisis menggunakan pendekatan manajerial kepatuhan Chayes dan Handler Chayes (1995), yang menjelaskan bahwa kesenjangan pelaksanaan perjanjian internasional dapat dipengaruhi oleh ambiguitas aturan, keterbatasan kapasitas, dan perubahan keadaan. Ketiga aspek tersebut digunakan untuk menelaah hubungan antara komitmen internasional, kebijakan nasional, dan praktik konservasi Curik Bali (*Leucopsar rothschildi*) di Unit Suaka Satwa Curik Bali (USSCB), Taman Nasional Bali Barat (TNBB). Berdasarkan data wawancara dan dokumentasi, temuan penelitian memberikan bukti dengan tingkat keterwakilan yang berbeda pada setiap aspek.

Pertama, ambiguitas dan ketidakjelasan aturan (*ambiguity and indeterminacy*). Temuan mengenai SOP yang belum seluruhnya diformalkan dan perbedaan takaran pakan dalam dokumen menunjukkan adanya persoalan dalam standardisasi dan pengendalian dokumen operasional. Temuan ini relevan untuk mengkaji kejelasan prosedur internal, tetapi belum cukup untuk membuktikan adanya ambiguitas dalam ketentuan CITES. Oleh karena itu, indikator ini baru mewakili sebagian. Analisis lebih lanjut perlu membedakan apakah perbedaan tersebut berasal dari ketidakjelasan prosedur, pembaruan dokumen yang tidak seragam, atau persoalan administratif lainnya. Perbedaan ini penting karena Chayes dan Handler Chayes (1995) membahas ambiguitas dalam kewajiban perjanjian internasional,

sedangkan ketidakkonsistenan SOP internal merupakan persoalan pada tingkat pelaksanaan yang tidak otomatis menunjukkan ambiguitas norma internasional.

Kedua, keterbatasan kapasitas (*capacity limitations*). Temuan mengenai cakupan monitoring yang belum menjangkau seluruh individu, integrasi data yang belum optimal, serta kebutuhan standarisasi dokumentasi menunjukkan adanya tantangan dalam pengelolaan informasi konservasi. Wawancara dengan drh. Hana Retno Erdianti menjelaskan bahwa sebagian Curik Bali telah menyebar ke kebun dan lahan masyarakat sehingga berada di luar jangkauan monitoring rutin MONCULI. Temuan ini mendukung indikator keterbatasan kapasitas dalam arti adanya kesenjangan antara kebutuhan monitoring dan cakupan pengamatan yang tersedia. Namun, data tersebut belum cukup untuk menyimpulkan bahwa penyebabnya adalah kekurangan personel, anggaran, atau sarana. Dengan demikian, indikator ini terwakili pada aspek kapasitas monitoring dan pengelolaan data, sementara penyebab spesifik keterbatasan kapasitas masih perlu dibuktikan melalui data tambahan.

Ketiga, perubahan keadaan (*temporal dimension*). Perubahan sebaran Curik Bali memberikan bukti bahwa kondisi ekologis yang dihadapi pengelola berkembang seiring waktu. Populasi yang terpantau meningkat dari 14 ekor pada 2011 menjadi 692 ekor pada 2024, kemudian tercatat 515 ekor pada 2025. Berdasarkan wawancara, penurunan angka terpantau tersebut tidak dapat langsung ditafsirkan sebagai penurunan populasi aktual karena sebagian individu berada di luar jangkauan pengamatan. Temuan ini memperlihatkan bahwa perubahan sebaran spesies dapat meningkatkan kebutuhan adaptasi sistem monitoring. Dalam perspektif Chayes dan Handler Chayes (1995), perubahan keadaan relevan untuk menjelaskan tantangan pelaksanaan komitmen internasional ketika kondisi yang dihadapi mengalami perkembangan. Meskipun demikian, data populasi tersebut lebih langsung menggambarkan dinamika ekologis dan tantangan pengelolaan daripada membuktikan perubahan tingkat kepatuhan terhadap CITES.

Secara keseluruhan, temuan penelitian memberikan dukungan paling jelas pada aspek kapasitas monitoring dan perubahan keadaan, sedangkan aspek ambiguitas aturan baru terwakili secara terbatas melalui persoalan dokumentasi SOP. Ketiga aspek tersebut membantu menjelaskan kesenjangan dalam tata kelola konservasi, tetapi belum cukup untuk menetapkan tingkat kepatuhan hukum USSCB terhadap CITES. Penilaian tersebut memerlukan identifikasi kewajiban CITES yang relevan dengan aktivitas penelitian, pembagian kewenangan antara USSCB dan otoritas CITES Indonesia, serta bukti pelaksanaan kewajiban yang bersangkutan. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini terletak pada penjelasan mengenai bagaimana perubahan kondisi ekologis dan kapasitas pengelolaan informasi membentuk tantangan pelaksanaan konservasi di tingkat unit, sekaligus menunjukkan batas penggunaan teori kepatuhan internasional untuk menilai praktik konservasi lokal.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan standar CITES dalam konservasi Curik Bali (*Leucopsar rothschildi*) di Unit Suaka Satwa Curik Bali (USSCB), Taman Nasional Bali Barat (TNBB), berlangsung terutama melalui kebijakan nasional dan praktik kelembagaan konservasi, bukan melalui penerapan langsung ketentuan perdagangan internasional pada setiap kegiatan operasional. Praktik konservasi yang ditemukan meliputi pemantauan

populasi, identifikasi individu menggunakan ring dan *stud book*, serta pelaksanaan program konservasi. Namun, integrasi data, cakupan monitoring, dan standardisasi dokumentasi masih menghadapi kendala. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan penguatan tata kelola operasional, meskipun belum dapat secara langsung dikategorikan sebagai pelanggaran CITES.

Faktor yang memengaruhi kesesuaian dan kesenjangan tersebut mencakup kapasitas pengelolaan data, konsistensi prosedur internal, dan perubahan sebaran Curik Bali yang meningkatkan kebutuhan monitoring adaptif. Dalam perspektif *compliance theory* Chayes dan Handler Chayes (1995), temuan ini menunjukkan relevansi kapasitas kelembagaan dan perubahan keadaan dalam menjelaskan tantangan pelaksanaan komitmen internasional. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan ekologis tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran kepatuhan terhadap CITES. Penilaian kepatuhan tetap memerlukan pemetaan kewajiban CITES yang relevan, pembagian kewenangan, serta bukti pemenuhan kewajiban tersebut. Penguatan integrasi data, standardisasi dokumentasi, dan adaptasi monitoring menjadi langkah penting untuk mendukung tata kelola konservasi Curik Bali yang lebih konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andersson, K., Challender, D. W. S., & Hughes, A. C. (2021). International trade and biodiversity conservation: The role and effectiveness of CITES. *Global Ecology and Conservation*, 28, e01678.
- Balai Taman Nasional Bali Barat. (2025). *Laporan monitoring Curik Bali tahun 2025*. Jembrana: Balai Taman Nasional Bali Barat.
- Booth, H., Nijman, V., & Phelps, J. (2020). Evaluating the impact of international trade regulations on wildlife conservation: Evidence from Indonesia. *Biological Conservation*, 241, 108390.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101.
- Challender, D. W. S., Harrop, S. R., & MacMillan, D. C. (2023). Understanding the international trade in wild species and the effectiveness of CITES. *Conservation Letters*, 16(2), e12940.
- Challender, D. W. S., Wyatt, T., & Hughes, A. C. (2025). Capacity constraints and institutional challenges in the implementation of CITES. *Environmental Science & Policy*, 163, 103910.

- Chayes, A., & Chayes, A. H. (1993). On compliance. *International Organization*, 47(2), 175-205.
- Chayes, A., & Chayes, A. H. (1995). *The new sovereignty: Compliance with international regulatory agreements*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- CITES Secretariat. (2022). *Guidance on captivity, breeding, and traceability of Appendix I listed species*. Geneva: CITES Secretariat.
- CITES Secretariat. (2023). *Capacity-building strategy for implementation and compliance*. Geneva: CITES Secretariat.
- CITES Secretariat. (2025). *Non-detriment findings (NDF) guidelines and update methodology (CoP20 Document)*. Geneva: CITES Secretariat.
- Danby, R., Sutomo, & Hernowo, J. B. (2022). Behavioral aspects and conservation success of the Bali Myna (*Leucopsar rothschildi*). *Journal of Wildlife Management*, 86(4), e22180.
- Escobar-Pemberthy, N., & Ivanova, M. (2020). Implementation of global environmental agreements: A framework for assessment. *Sustainability*, 12(17), 6932.
- Hardini, P., Sutomo, & Hernowo, J. B. (2023). Carrying capacity analysis of Bali Myna (*Leucopsar rothschildi*) in Nusa Penida. *Journal of Tropical Ecology*, 39(1), 45-56.
- Hernowo, J. B. (2017). Perkembangan populasi Curik Bali (*Leucopsar rothschildi*) pasca pelepasliaran di Taman Nasional Bali Barat. *Jurnal Media Konservasi*, 22(3), 210-218.
- Hughes, A. C., Andersson, K., & Challender, D. W. S. (2023). Monitoring international wildlife trade: Data quality and systemic challenges under CITES. *Conservation Biology*, 37(3), e14012.
- Lyman, E. (2023). Domestic implementation of international environmental law: Enforcement gaps in CITES. *International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics*, 23(1), 89-107.
- Mas'oed, M. (1990). Ilmu hubungan internasional: Disiplin dan metodologi. LP3ES.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Mitchell, R. B. (2021). *International politics and the environment* (2nd ed.). London: Routledge.
- Morton, O., Nijman, V., & Edwards, D. P. (2024). Formal compliance versus conservation effectiveness in CITES implementation. *Nature Ecology & Evolution*, 8(2), 312-322.
- Oyanedel, R., Nijman, V., & Phelps, J. (2023). Data limitations and monitoring gaps in sustainable wildlife trade under CITES. *Biological Conservation*, 279, 109920.

- Squires, Z. E., Hernowo, J. B., Sutomo, & Danby, R. (2023). Population growth and spatial distribution of Bali Myna (*Leucopsar rothschildi*) across human-dominated landscapes. *Oryx*, 57(5), 620-631.
- Squires, Z. E., Sutomo, Hernowo, J. B., & Danby, R. (2024). Conservation management and population recovery of the critically endangered Bali Myna (*Leucopsar rothschildi*). *Conservation Evidence*, 21, 15-26.
- Sugiyono. (2022). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D (Edisi ke-2, cetakan ke-29). Alfabeta.
- Sutomo. (2021). Karakteristik habitat dan pola sebaran Curik Bali (*Leucopsar rothschildi*) di Taman Nasional Bali Barat. *Jurnal Ilmu Kehutanan*, 15(2), 112-125.
- Tandungan, S., Palullungan, A., & Parantean, A. (2021). Implementasi CITES di Indonesia: Pembagian kewenangan antara Management Authority dan Scientific Authority. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 7(2), 180-198.
- Wyatt, T. (2021). *Is CITES protected? Assessing the effectiveness of the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*. London: Routledge.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications